

## **TESIS**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM DANA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PABAHANAN KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT**

Sebagai Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik

Oleh :

**HENNY FITRIANIE**  
**NIM. 2120419320015**



**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**  
**BANJARMASIN**  
**2023**

## PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Program Dana Dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pabahan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Nama : Henny Fitrianie

NIM : 2120419320015

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Disetujui Komisi Penguji



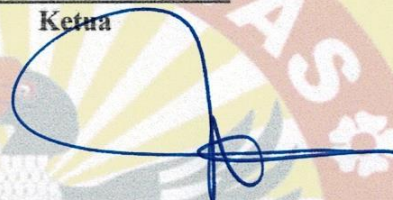
Prof. Dr. H. Asmu'i, M.Si

Ketua



Dr. Mahyuni, S.Sos., M.AP

Anggota

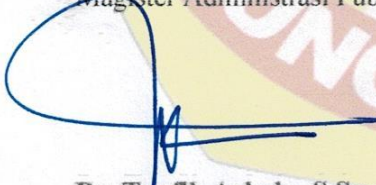


Dr. Taufik Arbain, S.Sos., M.Si

Anggota

Mengetahui

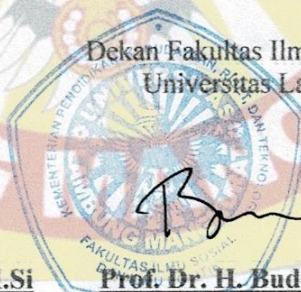
Koordinator Program Studi  
Magister Administrasi Publik



Dr. Taufik Arbain, S.Sos., M.Si  
NIP. 19740307200212 1 003

Tahun Lulus 2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos., M.Si  
NIP. 19730122 199802 1 001

Tanggal Wisuda:

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Penelitian ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (Sarjana, Magister, atau Doktor), baik di Universitas Lambung Mangkurat maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Penelitian ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing.
3. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Banjarmasin, 9 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan,



**HENNY FITRIANIE**  
**NIM. 2120419320015**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kayu Tangi Banjarmasin Telp/Fax(0511) 3307718  
Email Center:maptbs\_unlam@yahoo.com; Laman:www.map.ulm.ac.id

**BERITA ACARA UJIAN AKHIR TESIS**

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *Sembilan* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* telah dilaksanakan Ujian Akhir Tesis nomor surat *7071/RHS/UN8.1.13/KP.10.00/2023*.jam *Sembilan Wita* yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Program Dana Dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut* ." mahasiswa :

Nama : **Henny Fitrianie**  
NIM : **2120419320015**  
Program : **Magister Administrasi Publik (MAP)**

Dengan nilai sebagai berikut:

Nama/Jabatan	Nilai (Angka)	Tanda Tangan
Penguji		
<b>Prof. Dr. H. Asmu'i, M.Si</b>	80,4	
Penguji		
<b>Dr. Mahyuni, M.AP</b>	80,2	
Penguji		
<b>Dr. Taufik Arbain, S.Sos., M.Si</b>	80	
	<b>Rerata</b>	<b>80,2</b>

Demikian Berita Acara ujian akhir tesis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mahasiswa yang Ujian

**Henny Fitrianie**  
NIM.2120419320015

Banjarmasin, 09 Desember 2023  
Ketua Tim Penguji

**Prof. Dr. H. Asmu'i, M.Si**  
NIP.

Mengetahui:  
Koordinator Program,

**Dr. Taufik Arbain, S.Sos., M.Si**  
NIP. 197403072002121003



**Catatan :**

*Blangko penilaian dan semua berka sdikembalikan kebagian pendidikan oleh Ketua Tim Penguji dan tidak diberikan kepada mahasiswa*



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
PROGRAM PASCASARJANA**

**SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI**

NOMOR : 067/UN8.4/SE/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

**Henny Fitrianie**

Dengan Judul Tesis:

Implementasi Kebijakan Menteri dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Program Dana dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi  $\leq 20\%$ , dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 1 Februari 2024

Direktur,



Prof. Dr. H. Bambang Biyatmoko, M.Si.

NIP. 86805071993031020

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwataala Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat, disamping manfaat yang mungkin dapat disumbangkan dari penelitian ini kepada semua pihak yang berkepentingan.

Penghargaan dan terimakasih yang tulus penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat
2. Direktur Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat
3. Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Administrasi Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat
4. Prof. Dr. H. Asmu'i, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan serta dorongan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Mahyuni, M.AP selaku Penguji I
6. Dr. Taufik Arbain, S.Sos, M.Si selaku Penguji II
7. Waradian Bangkit Nugroho, S.STP selaku Lurah Pabahanan beserta seluruh jajarannya yang telah membantu, mendukung dan memberi izin kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Suami dan keluarga yang juga selalu mendukung dan membantu saya dari awal sampai dengan saya dapat menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan Bapak/Ibu sekalian dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Banjarmasin, 9 Desember 2023

Penulis

**HENNY FITRIANIE**  
**2120419320015**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Teori Kebijakan .....	20
1. Kebijakan Publik.....	20
2. Tahap-Tahap Kebijakan.....	23
3. Implementasi Kebijakan.....	25
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan..	33
2.3 Teori Pembangunan dan Pemberdayaan.....	37
1. Teori Pembangunan.....	37
2. Teori Pemberdayaan.....	40
3. Kelurahan.....	44
4. Kerangka Pemikiran.....	62
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	64
3.2 Tipe Penelitian.....	64
3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	64
3.4 Focus Penelitian.....	65
3.5 Instrumen Penelitian.....	65
3.6 Informan Penelitian.....	65
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	66
3.8 Teknik Analisis Data.....	67
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN</b>	
4.1 Sejarah Berdirinya Kelurahan Pabahanan.....	69
4.2 Visi dan Misi.....	74
4.3 Struktur Organisasi Kelurahan Pabahanan.....	75
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Hasil Penelitian.....	78
5.1.1 Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Program Dana dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.....	78



5.1.1.1	Sosialisasi.....	79
5.1.1.2	Pelaksanaan Kegiatan.....	88
5.1.1.3	Monitoring dan Evaluasi.....	117
5.2	Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menghambat Implementasi Kebijakan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Program Dana dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.....	127
5.2.1	Lemahnya Koordinasi.....	127
5.2.2	Keterbatasan Anggaran.....	129
5.2.3	Keterbatasan Sumber Daya Manusia.....	123
5.2.4	Kurangnya Komunikasi Kelurahan dengan Kementerian.....	123
5.2.5	Kebijakan Kurang Responsife.....	135
5.2.6	Minimnya Tenaga Produktif.....	136
5.3	Hasil Pembahasan.....	137
5.3.1	Sosialisasi.....	137
5.3.2	Pelaksanaan Kegiatan.....	141
5.3.3	Evaluasi dan Monitoring.....	143
5.3.3.1	Evaluasi.....	143
5.3.3.2	Monitoring.....	144
5.3.3.3	Tujuan Monev.....	145
5.3.3.4	Sasaran Monev.....	145
<b>BAB VI KESIMPULAN</b>		
6.1	Kesimpulan.....	148
6.2	Saran-Saran.....	153
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## ABSTRAK

**Henny Fitrianie, NIM. 2120419320015, 2023.** Implementasi Kebijakan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang program dana dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Program Studi Administrasi Publik, dibawah bimbingan Asmu'i.

Penelitian ini untuk mengetahui manfaat yang dapat dirasakan masyarakat setelah adanya Dana Kelurahan dari Pemerintahnya sendiri. Baik itu dari segi pelayanan publik maupun pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan di Kelurahan Pabahanan dan juga untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program ini di seluruh Kelurahan jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 pada Tahun Anggaran 2019.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari. Adapun Informan yang diwawancarai peneliti antara lain Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Seksi Pembangunan selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Masyarakat / Para Ketua RT selaku pemangku wilayah, dan LPM sebagai pelaksana kegiatan pembangunan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang mana pelaksanaannya adalah kelompok masyarakat/LPM yang ada di Kelurahan Pabahanan. Kepengurusan LPM terdiri dari para Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para Kader PKK. LPM di bentuk berdasarkan hasil rapat pihak kelurahan dengan tokoh masyarakat. Kepengurusan LPM dibentuk setiap 3 tahun sekali. Yang bertanggung jawab dan penandatanganan atas semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan adalah Ketua LPM, Sekretaris, dan Bendahara.

Faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Program Dana dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan di Kelurahan Pabahanan adalah lemahnya koordinasi, keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya komunikasi dari pihak kelurahan terhadap Kementerian, Kebijakan kurang responsif, kurangnya koordinasi masyarakat dengan pihak ketiga, minimnya tenaga produktif.

Dengan diadakannya kegiatan sosialisasi / Musrenbang setiap tahun dalam rangka menindaklanjuti dan meningkatkan pemerataan pembangunan di kelurahan Pabahanan sesuai dengan harapan kementerian dimana pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan bisa dilaksanakan dengan cepat melalui swakelola maka harus selalu saling berkoordinasi dan komunikasi antar ketua RT dengan pihak kelurahan dengan memanfaatkan teknologi yaitu membuat group whatsapp untuk memperoleh informasi dan komunikasi yang cepat atau bisa juga dilaksanakan rapat-rapat koordinasi antar RT, RW, dan tokoh masyarakat dengan pihak kelurahan setiap bulan sekali dijadwalkan pada malam hari karena pada siang hari kebanyakan para ketua RT masing-masing bekerja sehingga tidak dapat berhadir untuk melaksanakan rapat koordinasi tersebut.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pembangunan Dana Kelurahan

## ABSTRACT

**Henny Fitrianie, NIM. 2120419320015, 2023.** *Implementation of Minister of Home Affairs Policy Number 130 of 2018 concerning program funds in facilities and infrastructure development activities and community empowerment in Pabahanan Village, Pelaihari District, Tanah Laut Regency. Public Administration Study Program, under the guidance of Asmu'i.*

*This research is to find out the benefits that the community can feel after the existence of Village Funds from the Government itself. Both in the field of public services and development carried out by the Subdistrict Government in Pabahanan Subdistrict and also to determine the suitability of implementing this program in all Subdistricts if it is linked to Minister of Home Affairs Regulation No. 130 of 2018 in the 2019 Fiscal Year.*

*The research location was carried out in Pabahanan Village, Pelaihari District. The informants interviewed by researchers included the Village Head as the Authorized Budget User, the Head of the Development Section who is always the Technical Implementation Officer for Activities, the Assistant Expenditure Treasurer, and the Community/RT Heads as regional stakeholders, and the LPM as the implementer of development activities. The researcher used a qualitative descriptive research method where the data collection techniques used were interviews, observation and documentation.*

*In carrying out facilities and infrastructure development activities, the implementers are community groups/LPM in Pabahanan Village. LPM Management consists of RT/RW Heads, community leaders, religious leaders, and PKK cadres. The LPM was formed based on the results of a meeting between sub-district officials and community leaders. The LPM management is formed every 3 years. Those responsible for and signing all development activities carried out in the Subdistrict are the LPM Chair, Secretary and Treasurer.*

*Factors inhibiting the implementation of Minister of Home Affairs Policy Number 130 of 2018 concerning Fund Program for Development Activities and Empowerment of Facilities and Infrastructure in Pabahanan District are weak coordination, limited budget, limited human resources, lack of communication from the sub-district to the Ministry, less responsive policies, lack of coordination society with third parties, lack of productive power.*

*By holding socialization activities/Musrenbang every year in order to follow up and increase equitable development in the Pabahanan sub-district area in accordance with the ministry's expectations, where the development of facilities and infrastructure as well as community empowerment in the sub-district area can be carried out quickly through independent management, there must always be mutual coordination and communication. back and forth between the RT head and other parties. sub-districts by utilizing technology, namely creating WhatsApp groups to obtain information and fast communication or coordination meetings between RT, RW and community leaders and sub-district officials can also be held once a month, scheduled in the evening because during the day most of the heads of their respective RTs work so he could not attend the coordination meeting.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Development of Facilities and Infrastructure, Development of Village Funds*